

Strategi Pemerintah Provinsi Riau dan *Stakeholder* yang Bertanggungjawab dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Riau

Dimas Raka Kurniawan Putra¹ Syamsul Maarif² Lilik Kurniawan³ Pujo Widodo⁴ Herlina Juni Risma Saragih⁵

Prodi Manajemen Bencana, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia ^{1,2,3,4,5}

Email: dimasraka38311@gmail.com ¹

Abstrak

Masalah Covid-19 di Provinsi Riau harus diantisipasi bersama karena pada 9 Februari 2022 terus meningkat. Covid-19 terus meningkat khususnya di Provinsi Riau. Dalam kasus kasus Covid-19 yang terus meningkat, pemerintah harus siap menghadapi kondisi tersebut. Tak hanya pemerintah, seluruh pemangku kepentingan yang bergerak di bidang ini juga harus ikut serta dalam penanganan Covid-19 di Riau. Penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah provinsi Riau dan pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Riau. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan *Focused Group Discussion* (FGD). Hasil dari penelitian ini adalah penanggulangan bencana Covid-19 di Provinsi Riau tergolong sangat baik. Hal itu terlihat dari indikator kesiapsiagaan Pemprov Riau yang menyusun regulasi dan pelaksanaan pengurangan risiko bencana terhadap penyebaran Covid-19 serta efektifitas regulasi tersebut. Setiap stakeholder juga turut membantu dalam penanganan Covid-19 seperti beberapa perusahaan yang melakukan CSR berupa pembagian hand sanitizer, masker dan kebutuhan lainnya. Polda Riau juga ikut serta dalam penanggulangan bencana Covid-19 yaitu dengan mendistribusikan vaksin di daerah tertinggal, terdepan, terluar agar penyebaran vaksin berjalan lancar.

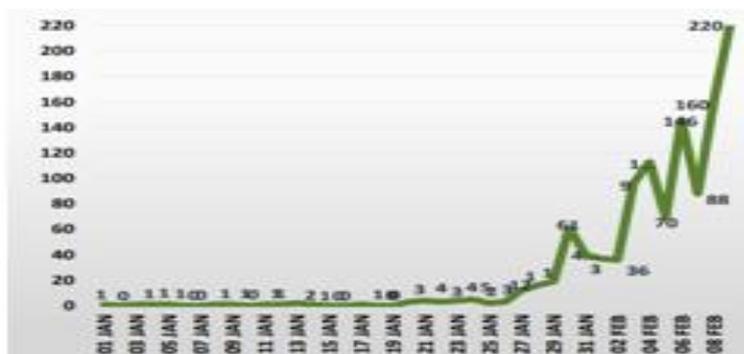
Kata Kunci: Covid-19, Pemerintah, Provinsi Riau, *Stakeholder*



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Penyebaran Covid-19 di Indonesia, Pemerintah secara resmi mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020. Dua warga negara Indonesia yang positif mengaku sempat kontak langsung dengan warga negara Jepang yang sedang berkunjung ke Indonesia. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya terjadi kasus kematian yang disebabkan oleh virus corona. Korban meninggal adalah pria berusia 59 tahun asal Solo. Ia diketahui tertular setelah mengikuti seminar di Bogor pada Februari lalu. Masalah Covid-19 khususnya di Provinsi Riau harus diantisipasi bersama. Dan saat ini, penyebaran kasus Covid-19 di Provinsi Riau per 9 Februari 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan jumlah kasus di awal Januari 2022. Lonjakan kasus ini sejalan dengan tren yang terjadi. terjadi di seluruh Indonesia sejak kasus pertama penularan Covid-19 varian Omicron terdeteksi di Jakarta. Tren kasus harian Covid-19 di Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Covid-19 di Provinsi Riau

Sumber : <https://corona.riau.go.id/>

Menurut data yang dikutip dari corona.riau.go.id pada 10 Februari 2022, Provinsi Riau memiliki total 129.877 kasus terkonfirmasi Covid-19 dengan Kota Pekanbaru memiliki kasus tertinggi sebanyak 52.885 kasus dan disusul Kota Dumai dengan 10.365 kasus. Awalnya, evolusi virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum mewabah di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Saat ini, Covid-19 telah menjadi pandemi yang menyerang hampir semua negara di belahan bumi manapun (World Health Organization, 2020)

Secara karakteristik, Covid-19 dapat menyebabkan pneumonia ringan hingga berat, serta penularannya sangat cepat dan dapat terjadi antar manusia. Covid-19 sangat sensitif terhadap sinar ultraviolet (sinar UV) dan panas serta dapat dinonaktifkan secara efektif dengan hampir semua disinfektan. Namun penggunaan hand sanitizer yang mengandung chlorhexidine tidak dianjurkan (Kemenkes RI, 2020). Secara klinis, Covid-19 memiliki gejala dan karakter tersendiri, seperti masa inkubasi Covid-19 berkisar antara 1 sampai 14 hari dan umumnya terjadi antara 3 sampai 7 hari (Safrizal, dkk, 2020). Penelitian lain juga menyebutkan bahwa tanda dan gejala yang dialami oleh seseorang yang telah terinfeksi virus Covid-19 akan muncul pada hari ke 2 hingga ke 14 setelah terpapar virus tersebut (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, 2020). Gejala yang dialami oleh penderita Covid-19 antara lain: Demam; Batuk; sesak napas atau kesulitan bernapas; Lelah dan mudah lelah; Nyeri pada otot atau seluruh tubuh; Sakit kepala; Kehilangan kemampuan untuk merasakan dan mencium; Sakit tenggorokan; Hidung tersumbat.

Secara etimologi pentahelix berasal dari penta yang artinya lima dan helix adalah jalinan. Pendekatan Pentahelix didasarkan pada lima jenis pemangku kepentingan, yaitu akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu mengelola kompleksitas masalah atau masalah berbasis peran atau aktor. Salah satu bentuk multikulturalisme dalam penanggulangan bencana khususnya bencana yang terjadi di Indonesia adalah konsep kerjasama pentahelix. Komposisi keragaman entitas dapat dikelola berdasarkan pendekatan tata kelola kolaboratif. Tata kelola kolaboratif adalah pengaturan pemerintah di mana lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan bersama secara deliberatif. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan di masyarakat melalui serangkaian faktor yang sangat penting dalam proses kolaboratif. Upaya penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam menghadapi bencana Covid-19, mulai dari tindakan kuratif, tindakan promotif, dan tindakan preventif.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk (2021) yang mengkaji desa tangguh: bentuk kerjasama antar pemangku kepentingan dalam merespon pandemi Covid-19 yang berujung pada keberhasilan program desa Tangguh Semeru yang melibatkan seluruh masyarakat dalam memutuskan mata rantai Sebaran covid19. . Karena dengan adanya program Tangguh Village, petugas yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik. Masyarakat juga turut serta menciptakan kesadaran masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19 (Rahmawati, dkk., 2020). Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Widyati dan Widana (2020) yang menemukan bahwa masyarakat dan aparat berperan dalam penyebaran Covid-19. Kapasitas layanan kesehatan dalam menangani Covid-19 meningkat. Adanya kemandirian dalam pembuatan obat dan vaksin untuk mengurangi dampak Covid-19 (Widyati dan Widana, 2020)

METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk menggali dan memahami suatu masalah sosial atau kemanusiaan seseorang atau kelompok (Creswell,

1998). Rancangan penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif yaitu melalui pengumpulan dan analisis data dengan metode kualitatif yang didukung dengan informasi yang diperoleh selama penelitian dan kajian pustaka dengan menggunakan data sekunder. Kemudian informasi yang telah diperoleh diolah menjadi kajian dalam pembahasan penelitian ini.

Waktu penelitian dilaksanakan dari tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022. Lokasi penelitian berada di Provinsi Riau yang dilaksanakan secara daring pada Kuliah Kerja Rumah Tangga Universitas Pertahanan Tahun 2022 yang dihadiri oleh Kabbidokes Polda Riau, Indragiri BPBD Kabupaten Hilir, dan Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui Focus Group Discussion (FGD), wawancara dan menggunakan data sekunder, dimulai dari data yang diperoleh dari website stakeholder terkait, peraturan daerah dan dokumen lain yang dapat mendukung penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Siklus Penanggulangan Bencana dibagi menjadi empat siklus yaitu pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Sebagai suatu siklus, setiap tahapan penanggulangan bencana dilakukan dengan kegiatan yang berbeda-beda, antara lain: 1. Pencegahan dan penanggulangan, yang dilakukan dalam keadaan tidak terjadi bencana, yang bertujuan untuk meminimalisir dampak bencana; 2. Kesiapsiagaan, yaitu dilakukan ketika ada potensi bencana yang mungkin terjadi sehingga mengetahui cara merespon dan menghadapi bencana tersebut; 3. Tanggap darurat yang dilakukan pada saat terjadi bencana dengan tujuan untuk mengurangi jumlah korban yang terus bertambah; 4. Pemulihan dilakukan pada saat kondisi aman pascabencana dan bertujuan untuk memulihkan kembali aktivitas masyarakat. Yang dapat dilihat pada Gambar 2.

Siklus Penanggulangan Bencana



Gambar 2. Siklus Manajemen Bencana

Sumber : Triutomo, dkk (2011)

Selama masa pencegahan dan penanggulangan, Pemprov Riau khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Indragirihilir melakukan pencegahan dan penanggulangan berupa tindakan preventif seperti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penyemprotan disinfektan menggunakan peralatan standar, melintasi daerah terpencil dan daerah yang ramai, Dan setelah kasus positif naik cukup cepat, semua petugas yang terlibat sudah mulai bergerak dengan pembatasan wilayah, patroli, penjagaan di daerah perbatasan, dengan himbuan untuk memakai masker (BPBD Indragirihilir, 2022).

Seperti yang dikatakan Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, oleh karena itu anggaran yang dibuat untuk pencegahan jauh lebih besar untuk dinas kesehatan seperti pamflet, diskusi berbagai media, untuk

memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai dampak buruk dari angka positif tinggi dari covid. Selain pamflet di pusat perbelanjaan, toko, baliho, tentang bahaya omicron juga ada sosialisasi di televisi provinsi dan sudah menjadi paradigma bahwa penyakit ini berbahaya (Plt Kepala Dinas Kesehatan, 2022).

Kabid Dokter Kesehatan (Kabbidokes) Polda Riau juga berperan dalam pencegahan dan penanggulangan di Provinsi Riau dalam hal penegakan hukum atas tindakan yang melanggar hukum di masa pandemi Covid-19. Kabbidokes Polda Riau juga mengatakan bahwa komitmen Polda Riau dalam hal ini percepatan vaksinasi saja, beberapa rekan di puskesmas yang tidak mendukung pendistribusian vaksin kita juga menindak tegas hal tersebut, misalnya di non- posisinya, salah satu kepala puskesmas menghalangi pendistribusian vaksin. (Kabbidokes Polda Riau, 2022).

Pada masa kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Indragiri Hilir melakukan penyuluhan secara langsung kemudian melakukan penyuluhan melalui media online karena masyarakat jarang membuka media online bahkan di daerah terpencil banyak masyarakat yang tidak memahami apa yang disampaikan di media cetak. Kabidkes Polda Riau juga mengatakan tidak ada hal yang sulit bagi Brimob. Pendampingan yang disebutkan tadi merupakan bentuk keseriusan Kapolda dalam kegiatan vaksinasi ini, termasuk memimpin sendiri masing-masing stakeholder di Provinsi Riau. Di Provinsi Riau tidak pernah ada paksaan karena penolakan begitu kuat sehingga kami harus memaksakan paksaan pada satu daerah/kelompok. Namun, beberapa kesalahpahaman dapat muncul dari berita bohong atau ketidaktahuan publik tentang vaksin. Kami juga menyampaikan bahwa permasalahan di Riau lebih pada kekhawatiran orang tua dalam memvaksinasi anaknya (Kabbidokes Polda Riau, 2022).

Plt Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa untuk contingency plan yang dikoordinasikan Dinkes setiap bulannya, kita tetap sediakan BOR, dengan prediksi untuk mengantisipasi peningkatan pasien ini, dan tentunya penyesuaian di pelayanan rumah sakit, termasuk cadangan rumah sakit, termasuk olah raga. bangunan sebagai cadangan jika terjadi ledakan jumlah covid (Plt Kepala Dinas Kesehatan, 2022).

Pada masa tanggap darurat, Pemprov Riau fokus pada rumah sakit yang didukung oleh pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Untuk laboratoriumnya sendiri, Pemprov Riau menggunakan fasilitas dari rumah sakit. Kemudian saat ini BPBD Kabupaten Indragiri Hilir mencontohkan dari dirinya sendiri dan diantaranya mulai mengedukasi hal tersebut kepada setiap RT/RW terkait kebersihan dan disinfeksi dengan mengadakan pertemuan dan pendataan warga. Meski masyarakat suku kurang terdidik, namun dalam hal partisipasi sebenarnya lebih mudah diajak dan dibina. Saat kami melakukan kegiatan sosialisasi dan vaksin, rata-rata masyarakat justru ikut serta dan tidak menunjukkan perlawanan sama sekali. Satgas tersebut merupakan bentuk reaksi cepat pemerintah terhadap hilir Indragiri. Disini kita melakukan koordinasi terpadu dengan bupati agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Saat ini, antara kabupaten dan daerah, kami belum menemukan adanya bentrok antar satgas. Pemerintah telah menyediakan tempat isolasi yaitu Islamic center meskipun belum diresmikan namun sudah memiliki fasilitas dengan catatan tidak memaksa pasien (BPBD Indragiri Hilir, 2022).

KESIMPULAN

Penanganan bencana Covid-19 di Provinsi Riau tergolong sangat baik. Hal itu terlihat dari indikator kesiapsiagaan Pemprov Riau yang menyusun regulasi dan pelaksanaan pengurangan risiko bencana terhadap penyebaran Covid-19 serta efektifitas regulasi tersebut. Hal itu terlihat dari berbagai upaya penetapan regulasi terkait Covid-19, yakni Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

(Covid-19).) di Provinsi Riau, Peraturan Gubernur Riau no. Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pengobatan Khusus Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Riau dan peraturan lainnya. Dari regulasi yang telah ditetapkan Pemprov Riau melalui Pergub, jumlah kasus positif Covid-19 mengalami penurunan. Bahkan di awal tahun 2022, Provinsi Riau sempat mendapatkan 0 kasus positif selama beberapa hari.

Pemprov Riau juga terus berupaya menyampaikan informasi terkait Covid-19 secara berkala. Bahkan sampai melakukan sistem door to door untuk menyebarkan informasi. Salah satu caranya adalah dengan menerbitkan buku digital tanggap Covid-19 dari tingkat kecamatan bahkan hingga tingkat RT/RW. Hal ini bertujuan agar setiap kepala daerah di tingkat kecamatan, kecamatan bahkan RT/RW untuk terus melakukan sosialisasi terkait Covid-19 mulai dari pengetahuan tentang 5M dan sikap dalam menghadapi bencana Covid-19. Setiap stakeholder juga turut membantu dalam penanganan Covid-19 seperti beberapa perusahaan yang melakukan CSR berupa pembagian hand sanitizer, masker dan kebutuhan lainnya. Polda Riau juga ikut serta dalam penanggulangan bencana Covid-19 yaitu dengan mendistribusikan vaksin di daerah tertinggal, terdepan, terluar agar penyebaran vaksin berjalan lancar. Kapolda Riau juga sebagai pengawas dan penegak peraturan terkait pelanggaran yang dilakukan masyarakat terkait Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- BPBD Indragiri Hilir. (2022). *Kolaborasi Pentahelix dalam Penanggulangan Bencana Alan dan Covid-19 di Provinsi Riau Guna Mendukung Keamanan Nasional*. (Hasil Wawancara : 10 Maret 2022)
- Creswell, JW (1998). *Penyelidikan kualitatif dan desain penelitian: Memilih di antara lima tradisi*. Publikasi Sage, Inc.
- <https://corona.riau.go.id/> (diakses pada 19 Februari 2022).
- <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/> (diakses pada, 1 April 2022).
- Kabidokes Polda Riau. (2022). *Kolaborasi Pentahelix dalam Penanggulangan Bencana Alan dan Covid-19 di Provinsi Riau Guna Mendukung Keamanan Nasional*. (Hasil Wawancara 10 Maret 2022)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Penyakit Coronavirus (COVID-19)*. Jakarta : Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Organisasi Kesehatan Dunia. (2020). *Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19)*. dari: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/20200312-sitrep-52-covid-19.pdf?sfvrsn=e2bfc9c0_2 (Akses pada 1 April 2022)
- Plt Kepala Dinas Kesehatan. (2022). *Kolaborasi Pentahelix dalam Penanggulangan Bencana Alan dan Covid-19 di Provinsi Riau Guna Mendukung Keamanan Nasional*. (Hasil Wawancara: 10 Maret 2022)
- Rahmawati, dkk. (2020). Edukasi Protokol Kesehatan dalam pedoman New Normal di Masa Pandemi Melalui Media Poster. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*.
- Syafrizal, dkk. (2020). *Pedoman Umum Penanganan Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah, Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*. (Akses pada 1 April 2022) https://www.kemendagri.go.id/documents/COVID-19/BUKU_PEDOMAN_COVID-19_KEMENDAGRI.pdf
- Triutomo, dkk. (2011). *Indeks Rawan Bencana Indonesia*. Jakarta : Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Widyati, W., & Widana, I.D.K.K. (2021). Dampak positif pandemi Covid-19 untuk memperkuat Ketahanan Kesehatan Nasional. *Jurnal Ilmu Sosial Technium*, 24(1), 562–570. <https://doi.org/10.47577/tssj.v24i1.4612>